

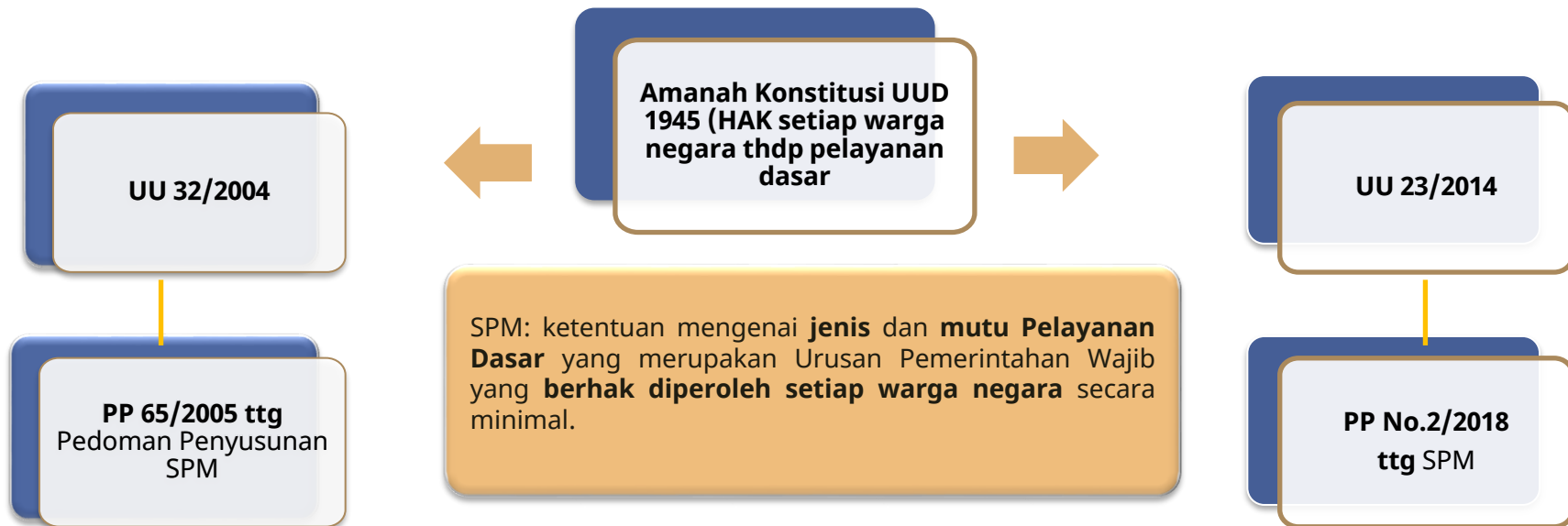
PENERAPAN SPM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

SRI PURWANINGSIH, SH, MAP
Sekretaris Ditjen Bina Pembangunan Daerah





PERUBAHAN TATANAN KEBIJAKAN SPM



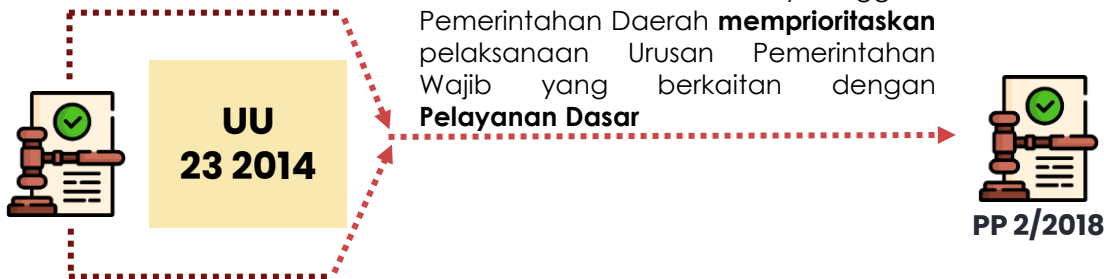
AMANAT PENERAPAN SPM

Pasal 1 Butir 17 : Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu **Pelayanan Dasar** yang merupakan **Urusan Pemerintahan Wajib** yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

Pasal 18: Penyelenggara Pemerintahan Daerah **memprioritaskan** pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan **Pelayanan Dasar**

Pasal 298: Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal

Pelaksanaan SPM yang mengatur tentang jenis pelayanan, mutu pelayanan dan penerima pelayanan dasar dan strategi penerapannya





REGULASI PENERAPAN SPM

PETUNJUK UMUM

Kemendagri



Permendagri 100
Tahun 2018

Secara teknis memuat tentang mekanisme dan strategi penerapan SPM mulai dari pengumpulan data, penghitungan pemenuhan kebutuhan dasar, perencanaan SPM, dan pelaksanaan SPM serta pelaporan

PETUNJUK TEKNIS

KL Teknis



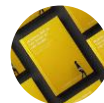
Permendikbud 32/2018

Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan



Permenkes 4/2019

Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar
Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan



PermenPUPR 29/Prt/M/2018

Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



Permendagri 121/2018

Tentang standar teknis mutu pelayanan dasar Sub
Urusan Ketenteraman dan
Ketertiban Umum
Di Provinsi dan Kabupaten/kota



Permendagri 101/2018

Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar
Pada SPM Sub-Urusan Bencana Daerah
kabupaten/kota



Permendagri 114/2018

Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar
Pada SPM Sub Urusan Kebakaran Daerah
Kabupaten/kota



Permensos 9/2018

Tentang Standard teknis pelayanan dasar
pada SPM bidang sosial Di daerah
provinsi dan di Daerah Kab/Kota



INDIKATOR LAYANAN



SPM

PROVINSI

JENIS LAYANAN DASAR

KABUPATEN/KOTA

PENDIDIKAN

- Pendidikan Menengah
- Pendidikan Khusus

- Pendidikan Anak usia dini
- Pendidikan Kesetaraan
- Pendidikan Dasar

KESEHATAN

- PELAYANAN KESEHATAN BAGI PENDUDUK :
- Terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi, dan
 - Pada kondisi kejadian luar biasa provinsi

- Ibu hamil
- Ibu bersalin
- Bayi baru lahir
- Balita
- Pada usia pendidikan dasar
- Pada usia produktif
- Pada usia lanjut
- Penderita hipertensi
- Penderita diabetes mellitus
- Orang dengan gangguan jiwa berat
- Orang terduga tuberkulosis
- Orang dengan resiko terinfeksi HIV

PEKERJAAN UMUM

- Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota
- Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kab/kota

- Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari
- Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik

PERUMAHAN RAKYAT

- Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi
- Fasilitas penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintahan daerah provinsi

- Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kab/kota
- Fasilitas penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kab/kota

TRANSTIBUMLINMAS

- Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum provinsi

- PELAYANAN :
- Ketenteraman dan ketertiban umum
 - Informasi rawan bencana
 - Pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
 - Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran
 - Penyelamatan dan evakuasi korban bencana

SOSIAL

- REHABILITASI SOSIAL DASAR : DIDALAM PANTI
- Penyandang disabilitas terlantar
 - Anak terlantar
 - Lanjut usia terlantar
 - Tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis
 - Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi

- REHABILITASI SOSIAL DASAR : DILUAR PANTI
- Penyandang disabilitas terlantar
 - Anak terlantar
 - Lanjut usia terlantar
 - Tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis
 - Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi



Tahapan Penerapan SPM

PENGUMPULAN DATA

1

Kebutuhan Data

- Jumlah dan identitas Warga Negara yang berhak menerima
- Jumlah barang dan/atau jasa yang sudah tersedia dan yg dibutuhkan
- Jumlah sarana, prasarana, dan sumber daya lainnya yang tersedia dan yg masih dibutuhkan
- Nama
- Alamat
- NIK
- No KK
- Jenis Kelamin
- Kecamatan
- Kabupaten
- Kebutuhan data
- Faktor tidak Bersekolah
- Uraian Faktor bersekolah
- Rencana melanjutkan sekolah
- Nama Satuan Pendidikan

2

PENGHITUNGAN KEBUTUHAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR



PD menghitung selisih ketersediaan B/J dan Sarpras



Jumlah Warga Negara penerima dan Mutu Pelayanan Dasar sesuai Standar Teknis SPM



Ketersediaan diperoleh dari :
BUMN/BUMD, lembaga non pemerintah, masyarakat, dan Pemda



Digunakan untuk menyusun kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar berpedoman pada Standar Biaya

PD menghitung Warga yang tidak mampu :

- Miskin atau tidak mampu
- tidak dapat diakses atau dijangkau sendiri;
- Kondisi bencana;
- Kondisi yang tidak memungkinkan untuk dapat dipenuhi sendiri

PELAKSANAAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR

4



Dok. Rencana

PROGRAM SPM
KEGIATAN SPM
SUB KEGIATAN SPM
INDIKATOR
TARGET CAPAIAN



Dok. Anggaran

JENIS BELANJA SPM
OBJEK BELANJA SPM
RINCIAN OBJEK BELANJA SPM
SUB RINCIAN OBJEK BELANJA PM

OPD melaksanakan program/kegiatan SPM dalam satu tahun anggaran

3

PENYUSUNAN RENCANA PEMENUHAN PELAYANAN DASAR



Jenis dan Mutu SPM

Jenis, Mutu, dan Penerima Pelayanan Dasar

- Penerima;
- Ketersediaan barang/jasa Pemenuhan kebutuhan dasar
- Pelaksanaan

Proses Perencanaan

Integrasi ke Dokrenda

- Permendagri 862017
- Permendagri 702019
- Permendagri 902019
- Keppmendagri 050/3708/2020
- Permendagri 172021

Proses Penganggaran

Integrasi ke dalam anggaran

- Permendagri 702019
- Permendagri 902019
- Regulasi Penganggaran Daerah





SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENERAPAN SPM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 060/K.476/2019
Tentang Pembentukan Tim Percepatan Penerapan SPM
Provinsi Kalimantan Timur

- a. Penanggung jawab : Gubernur dan Wakil Gubernur;
- b. Ketua : Sekda;
- c. Wakil Ketua : Kepala Bappeda Provinsi;
- d. Sekretaris I: Kepala Biro Pemerintahan , Perbatasan dan Otda Setda Provinsi.
- e. Sekretaris II : Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi

ANGGOTA

1. Inspektur
2. Kepala BPKAD
3. Kasatpol PP
4. Kadis Pendidikan dan Budaya
5. Kadis PU, TR, PR
6. Kadis Kesehatan
7. Kadis Sosial
8. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda

POKJA I

Bidang Sosial, Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan, Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.

Ketua : Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Prov. Kaltim
Sekretaris : Kepala Bagian Tata Laksana Biro Organisasi Setda Prov. Kaltim

Anggota :

1. Sekretaris Dinas Sosial
2. Sekretaris Dinas Pendidikan
3. Sekretaris Dinas Kesehatan
4. Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja
5. Kepala Sub Bagian Pengembangan Otonomi Daerah Biro Pemerintahan, Perbatasan dan Otonomi Daerah Setda





SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENERAPAN SPM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 060/K.476/2019
Tentang Pembentukan Tim Percepatan Penerapan SPM
Provinsi Kalimantan Timur

POKJA II

Bidang Perumahan, Bidang Pekerjaan Umum

Ketua : Kepala Bidang Prasarana Wilayah
Bappeda Prov. Kaltim

Sekretaris : Kepala Bagian Kelembagaan
Biro Organisasi Setda Prov. Kaltim

Anggota :

1. Kepala Bagian Aparatur Pemerintahan dan Otonomi Daerah Biro Pemerintahan, Perbatasan dan Otonomi Daerah Setda
2. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
3. Kepala Sub Bagian Tata Laksana Pelayanan Publik Setda Prov. Kaltim
4. Kepala Sub Bagian Tata Laksana Pemerintahan Setda Prov. Kaltim

POKJA III

Perencanaan dan Pengendalian Program

Perencanaan dan Pengendalian Program

Ketua : Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian
Pembangunan Daerah Bappeda Prov. Kaltim

Sekretaris : Kepala Bagian Pengembangan Kinerja
Instansi Biro Organisasi Setda Prov. Kaltim

Anggota :

1. Kepala Bidang Penganggaran BPKAD
2. Kepala Bagian Penyusunan dan Pengendalian Program Biro Administrasi Pembangunan Setda
3. Kepala Bagian Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Biro Administrasi Pembangunan Setda
4. Kepala Sub Bagian Akuntabilitas Kinerja Biro Organisasi Setda



TUGAS TIM PENERAPAN SPM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Bertugas mengkoordinasikan, pembinaan, monitoring dan evaluasi Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Evaluasi SK TIM Diatas

- a. Perlu membuat pedoman penerapan SPM dalam bentuk perkara sebagai penjabaran penerapan SPM di Provinsi Kalimantan Timur. Anggota Tim perlu ditambahkan :
 - Kepala Dinas Dukcapil
 - Kepala Dinas Kominfo
 - Kepala Dinas yang menangani urusan pemerintahan desa
- a. Kurang dijabarkan tugas tim SPM



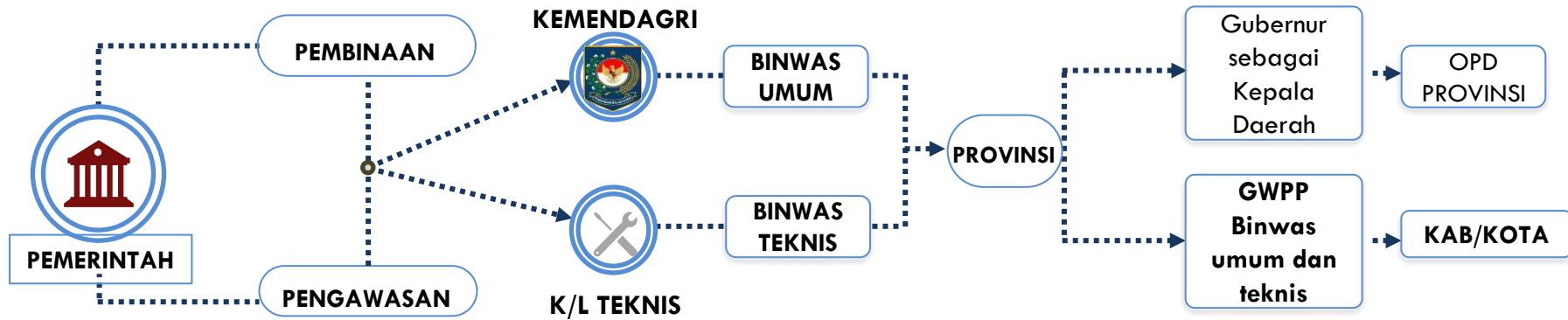
PEMBIAYAAN PENERAPAN SPM





PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN SPM

Pasal 373 s.d 378, UU 23 2014



Pembinaan dan Pengawasan Umum

- Menteri, terhadap penerapan SPM Daerah Provinsi
- GWPP terhadap penerapan SPM Daerah Kab/Kota
- Gubernur dan Bupati/Walikota, terhadap PD masing-masing

Pembinaan dan Pengawasan Teknis

- Menteri Teknis Pengampu SPM, terhadap penerapan SPM Daerah Provinsi
- GWPP terhadap penerapan SPM Daerah Kab/Kota
- Gubernur dan Bupati/Walikota, terhadap PD masing-masing





Capaian SPM

SE- PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

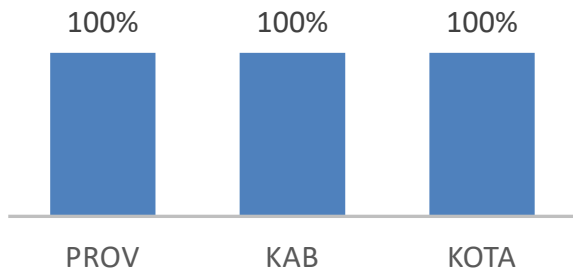
01



DATA PELAPORAN DAERAH

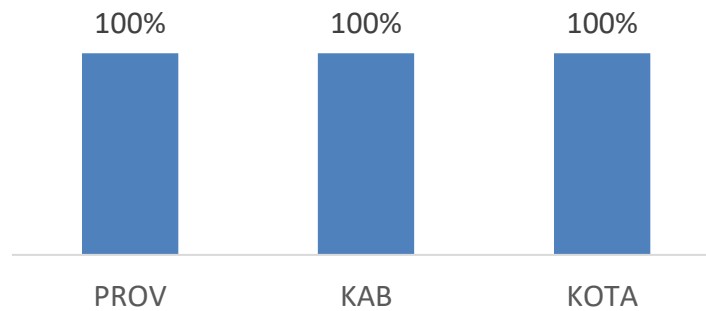
LINGKUP PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PELAPORAN SPM



Seluruh daerah sudah mengirimkan laporan penerapan SPM


SK TIM PENERAPAN SPM





Seluruh daerah sudah membentuk SK TIM Penerapan SPM





DATA PELAPORAN PENERAPAN SPM SE-KALIMANTAN TIMUR YANG DAPAT DIOLAH 2020 TAHUN 2021 (Provinsi, Kabupaten, dan Kota)


 PENDIDIKAN	
Jumlah dapat dianalisa	8
Persentase	73%
Jumlah belum dapat dianalisa	3
Persentase	27%

 KESEHATAN	
Jumlah dapat dianalisa	11
Persentase	100%
Jumlah belum dapat dianalisa	0
Persentase	0%

 PEKERJAAN UMUM	
Jumlah dapat dianalisa	11
Persentase	100%
Jumlah belum dapat dianalisa	0
Persentase	0%

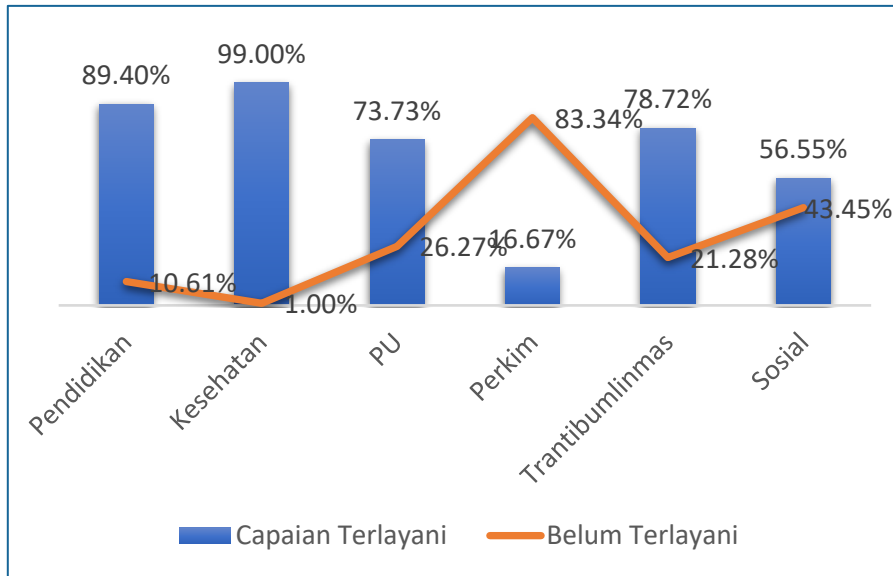
 PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	
Jumlah dapat dianalisa	7
Persentase	64%
Jumlah belum dapat dianalisa	4
Persentase	36%

 TRANTIBUMLINMAS	
Jumlah dapat dianalisa	11
Persentase	100%
Jumlah belum dapat dianalisa	0
Persentase	0%

 SOSIAL	
Jumlah dapat dianalisa	9
Persentase	82%
Jumlah belum dapat dianalisa	0
Persentase	18%

Sumber : Sekber SPM Ditjen Bina Bangda

CAPAIAN SPM SELURUH BIDANG PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 2020 TAHUN 2021



Sumber : Sekber SPM Ditjen Bina Bangda

CAPAIA PERKIM

- Indikator Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah layak huni bagi korban bencana capaian nya adalah 0%, dikarenakan pada tahun 2020, tidak terjadi bencana.
- Berdasarkan laporan SPM, anggaran untuk penerapan SPM **telah** dianggarkan oleh Prov Kaltim untuk bidang ini.

CAPAIA SOSIAL

- Indikator Penyandang Disabilitas Terlantar di Dalam Panti dan Tuna Sosial khusus Gelandangan dan Pengemis di dalam panti adalah 0%, dikarenakan tidak ada panti khusus untuk indikator tersebut.

CAPAIA KESEHATAN, PU DAN TRANTIBUMLINMAS

Capaian Kesehatan sudah mendekati capaian 100%, yaitu 99% sehingga dapat dikategorikan Baik. Adapun capaian Trantibumlinmas dan PU adalah 78.72% dan 73,73%

CAPAIA PENDIDIKAN

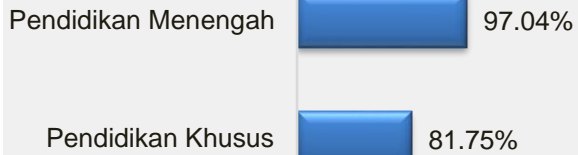
Capaian Pendidikan adalah sebesar **89.40%**, pada laporan masih terdapat GAP/selisih antara target dan realisasi, jumlah warga negara yang terlayani belum sesuai target yang ditetapkan, hal ini harus menjadi perhatian untuk dituntaskan oleh pemerintah provinsi.





CAPAIAN SPM BIDANG PER INDIKATOR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

01 BIDANG PENDIDIKAN



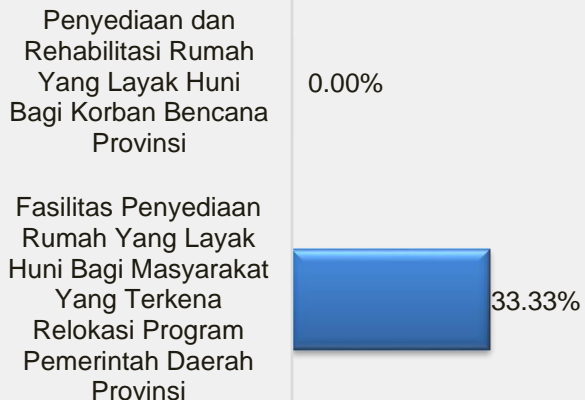
02 BIDANG KESEHATAN



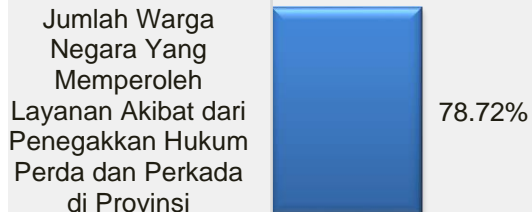
03 BIDANG PU



04 BIDANG PERKIM



05 BIDANG TRANTIBUMLINMAS



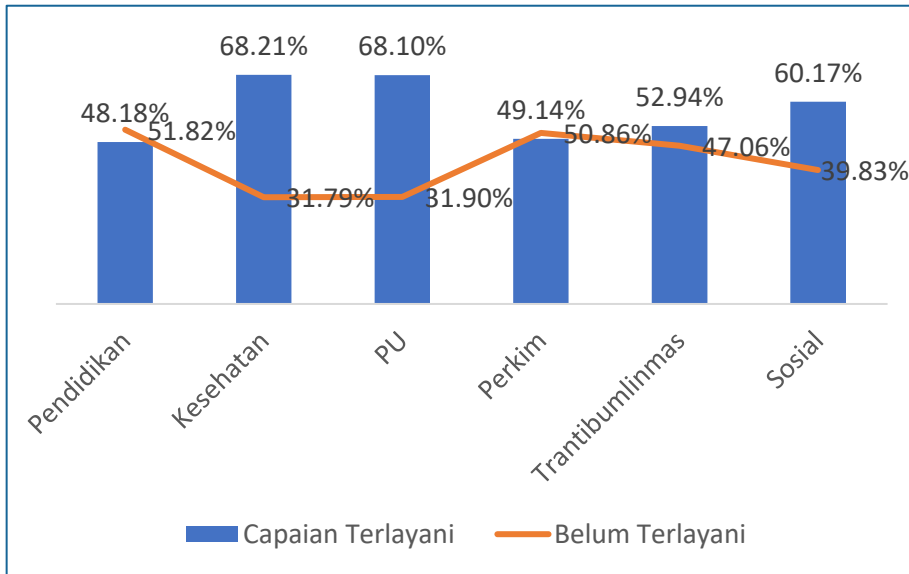
06 BIDANG SOSIAL





CAPAIAN SPM SELURUH BIDANG KAB/KOTA SE-KALIMANTAN TIMUR 2020

TAHUN 2021



CAPAIAN SPM

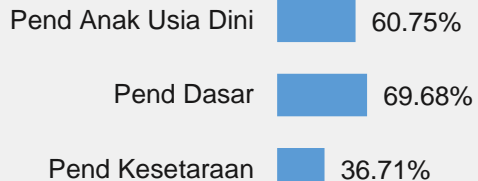
- Sebaran capaian tertinggi pada Capaian SPM seluruh Bidang Kab/ Kota Se-Kaltim adalah pada bidang Kesehatan yaitu sebesar 68,21%
- Sedangkan Capaian yang paling rendah adalah bidang Perkim yaitu sebesar 49,14%
- Sedangkan untuk bidang-bidang yang lain kisaran dari 52 s.d 68% an sudah cukup baik namun perlu ditingkatkan terutama bidang yang capaiannya mendekati 50 %
- Perlu adanya penguatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah terutama pada fungsi pembinaan agar dapat mendampingi Kab/Kota dalam meningkatkan capaian SPM pada masing-masing bidang urusan layanan wajibnya

Sumber : Sekber SPM Ditjen Bina Bangda

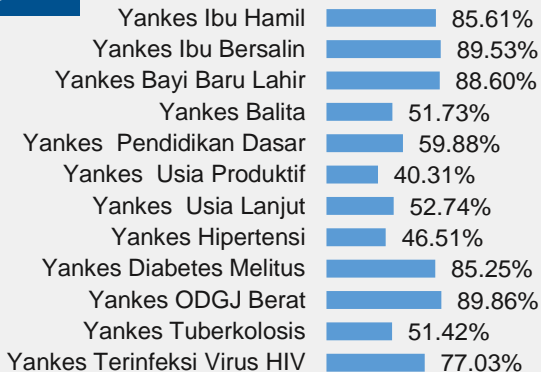


CAPAIAN SPM BIDANG PER INDIKATOR KAB/KOTA KALIMANTAN TIMUR

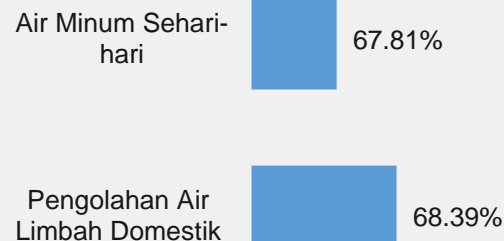
01 BIDANG PENDIDIKAN



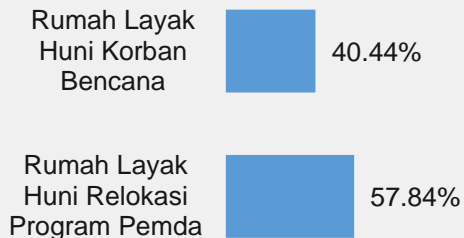
02 BIDANG KESEHATAN



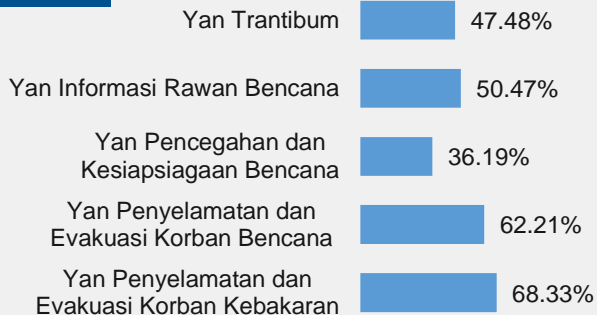
03 BIDANG PU



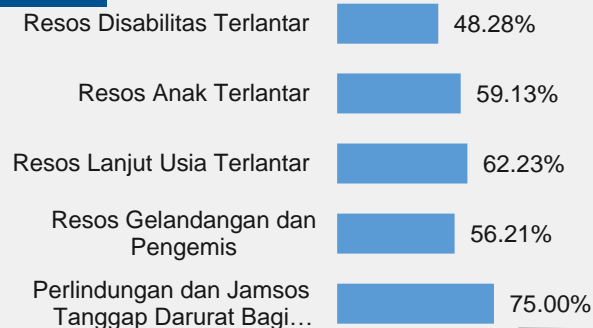
04 BIDANG PERKIM



05 BIDANG TRANTIBUMLINMAS



06 BIDANG SOSIAL



Sumber : Sekber SPM Ditjen Bina Bangda





PAGU ANGGARAN SPM SE-KALIMANTAN TIMUR 2020 TAHUN 2021

TOTAL PAGU ANGGARAN SPM SELURUH BIDANG SE-PAPUA BARAT

PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	PERSENTASI REALISASI
NIHIL	6.581.156.786.570	3.825.262.716.387	58,12%

TOTAL PAGU ANGGARAN SELURUH BIDANG PROVINSI

PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	PERSENTASI REALISASI
NIHIL	2.185.605.185.705	1.792.863.448.032	82,03%

TOTAL PAGU ANGGARAN SELURUH BIDANG SE-KABUPATEN

PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	PERSENTASI REALISASI
NIHIL	3.895.365.656.723	1.630.570.373.547	41,86%

TOTAL PAGU ANGGARAN SELURUH BIDANG SE-KOTA

PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	PERSENTASI REALISASI
NIHIL	500.185.944.142	401.828.894.808	80,34%

Sumber : Sekber SPM Ditjen Bina Bangsa





Permasalahan Dan Kendala Kaltim

1 Pengumpulan Data ●

- PD Pengampu sulit untuk menentukan kriteria penerima (contoh : Warga miskin)
- Data berubah fluktuatif, data ini hendaknya selalu diupgrade melalui secara online/upgrade data.
- Sulitnya berkoordinasi dengan pihak yang terkait dengan data yang dibutuhkan

2 Penghitungan Kebutuhan ○

- PD pengampu sulit untuk mengalokasikan anggaran
- PD sulit untuk menterjemahkan indikator (contoh : Mutu layanan)
- Berkurangnya anggaran akibat realokasi dan refocusing akibat pandemic covid-19

3 Penyusunan Rencana ●

- Sistem Perencanaan dan penganggaran kegiatan/program belum murni berbasis SPM
- Adanya keterbatasan anggaran menyebabkan tidak semua program/kegiatan SPM tidak dapat diakomodir
- Keterlambatan Proses Perencanaan Instansi

4 Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan ○

- Beberapa program/kegiatan tidak dapat terlaksana dikarenakan terkendala kondisi Pandemi Covid 19
- Berkurangnya anggaran akibat realokasi dan refocusing akibat pandemic covid-19



Permasalahan Per Bidang Urusan

01

PENDIDIKAN

1. Sulitnya pengumpulan data terkait anak tidak sekolah dan kriteria siswa miskin
2. Aksesibilitas pendidikan di wilayah 3T (Terpencil, Tertinggal dan Terluar) belum mencukupi
3. Beberapa kegiatan tidak dilaksanakan karena terkendala pembatasan pandemi covid
4. Pemerataan guru yang belum mencukupi

02

KESEHATAN

1. Sumber daya Kesehatan terbatas dan kurang memadai dalam penanggulangan KLB
2. Kurangnya tenaga Kesehatan terlatih di tingkat puskesmas
3. Kondisi pandemi covid menyebabkan kegiatan tatap muka pelayanan Kesehatan tidak dapat dilakukan
4. Keterbatasan jumlah dokter dan spesialis dalam pelayanan kesehatan
5. Aksesibilitas unit Kesehatan belum sebanding dengan luas wilayah

03

PEKERJAAN UMUM

1. Belum memiliki SPAM dan SPAL-D,
2. Belum adanya dokumen perencanaan SPAL Regional
3. Ketersediaan data belum optimal
4. Terkendala penyediaan lahan
5. Kondisi geografis menyulitkan untuk membangun sambungan saluran air minum/limbah
6. Koordinasi lintas sector belum optimal



Permasalahan Per Bidang Urusan

04

PERKIM

1. Perencanaan belum sesuai dengan kondisi lapangan
2. Belum mempunyai basis data kebencanaan
3. Keterbatasan anggaran
4. Sulitnya Sulitnya menghitung capaian SPM ketika tidak terjadi bencana dan akibat program pemerintah
5. Sulit menentukan target sasaran akibat bencana

05

TRANTRIBUMLINMAS

1. Keterbatasan anggaran
2. Proses pendataan belum optimal
3. Keterbatasan SDM Satpol PP, Damkar dan Bencana dalam melaksanakan SPM
4. Sarana dan prasarana belum memadai
5. Banyak kegiatan sosialisasi terkendala pandemi covid
6. Jangkauan wilayah yang luas menyulitkan pelayanan
7. Koordinasi lintas sektor belum optimal

06

SOSIAL

1. Data PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) belum akurat
2. Provinsi belum mempunyai panti pemerintah
3. Pembatasan pandemi covid menghambat pelayanan sosial
4. Kurangnya pendididkan dan pelatihan dalam pelayanan kesejahteraan social
5. Tenaga professional kesejahteraan sosial belum memadai



SANKSI ADMINISTRATIF



KDH dan Wakil KDH

Yang **tidak melaksanakan SPM**
Dijatuhi

Sanksi Administratif.



Sanksi Administratif :

PP 12/2017, Psi 37

- Teguran tertulis;
- Tidak dibayarkan hak keuangan selama 3 bulan;
- Tidak dibayarkan hak keuangan selama 6 bulan;
- Penundaan evaluasi rancangan Perda;
- Pengambilalihan kewenangan perizinan;
- Penundaan atau pemotongan DAU dan DBH;
- Mengikuti program pembinaan khusus pendalaman bidang pemerintahan;
- Pemberhentian sementara selama 3 bulan
- Pemberhentian



Strategi Peningkatan Efektifitas Penerapan SPM

A photograph of four women standing in a row on a wooden deck. They are wearing traditional Indonesian batik costumes, consisting of black long-sleeved tops with red and yellow geometric patterns, and black long skirts with large red and yellow batik motifs. They are also wearing red headbands with yellow accents. The background shows green foliage and a cloudy sky.

1

Memastikan pemenuhan SPM menjadi program prioritas dalam perencanaan daerah.

2

Penguatan Tim Penerapan SPM Se Provinsi Kalimantan Timur, didukung dengan alokasi pendanaan untuk kegiatan penunjangnya yang sudah tertera pada Permendagri 90/2019.

3

Penguatan Tim Penerapan terutama dalam hal fungsi Binwas untuk menekan kesenjangan Capaian SPM yang terjadi di Kab/Kota sehingga pemerataan capaian bidang-bidang SPM dapat tercapai Sesuai target dan merata.

4

Penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan pemenuhan SPM agar mengacu pada Permendagri 90/2019 jo. Kepmendagri 050/3708/2020

5

Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat dalam rangka peningkatan kualitas penerapan SPM.



TERIMA KASIH



Ditjen Bina Pembangunan Daerah



Ditjen Bina Pembangunan Daerah



bina_bangda



bina_bangda